

EVALUASI PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL
TUMPANGSARI DITINJAU DARI PENDAPATAN PESERTA
PROGRAM DAN KEBERHASILAN TANAMAN HUTAN

Oleh:

Irawan*)

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Lebih dari 83 persen rumahtangga di Indonesia bertempat tinggal di pedesaan, keadaannya memerlukan bantuan pemikiran untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Rendahnya pendapatan, sempitnya penguasaan tanah, rendahnya pendidikan, sulitnya mencari pekerjaan, merupakan masalah-masalah dalam kehidupan rumahtangga. Khususnya rumahtangga yang bertempat tinggal di sekitar hutan, keadaan ini dapat berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kelestarian hutan, seperti terjadi penyerobotan lahan hutan, pencurian kayu, perencekan, penggembalaan liar, dan lain-lain.

Salah satu alternatif untuk memecahkan masalah tersebut, pada tahun 1984 Perum Perhutani menyelenggarakan gerakan program Perhutanan Sosial. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani miskin sekaligus menghutankan kembali lahan hutan yang rusak serta memperbaiki hubungan antara petugas Perum Perhutani dengan para petani.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui (1) sejauh mana sumbangan program perhutanan sosial terhadap pendapatan peserta program, (2) bagaimana tingkat keberhasilan tanaman hutan di lokasi program perhutanan sosial diterapkan.

*) Mahasiswa S₁ Fakultas Kehutanan IPB di bawah bimbingan Dr Ir Junus Kartasubrata dan Ir Budi Kuncahyo.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Setiawargi, Kecamatan Cibeureum, Kabupaten Tasikmalaya, termasuk wilayah Perum Perhutani RPH Sukaraja, BKPH Singaparna, KPH Tasikmalaya. Pelaksanaan penelitian selama 3 bulan, Agustus sampai dengan November 1989.

Metode Pengambilan contoh dan Jenis Data

Dalam mengevaluasi pendapatan, metode pengambilan contoh yang dipergunakan yaitu *Stratified Random Sampling* dengan alokasi berimbang. Stratifikasi dilakukan terhadap rumahtangga peserta dan bukan-peserta program berdasarkan luas pemilikan lahan. Rumahtangga tersebut dikelompokkan menjadi empat strata, yaitu; stratum I rumahtangga dengan pemilikan lahan > 0.5 hektar, stratum II: 0.26 - 0.50 hektar, stratum III: 0.01 - 0.25 hektar dan stratum IV: rumahtangga tak bertanah. Jumlah sampel (responden) diambil atas dasar sampling pendahuluan, dimana dalam penelitian ini dilakukan pengambilan sebanyak 60 responden. Sedangkan dalam mengevaluasi tingkat keberhasilan tanaman hutan digunakan metode *Systhematic Sampling with Random Start* dengan petak ukur berbentuk lingkaran sebagai unit contohnya. Radius petak ukur berukuran 7.94 m (0.02 ha) dengan jarak petak ukur satu sama lain 100 m dan intensitas sampling sebesar 2 %.

Jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder melalui observasi dan survai. Data primer yang dikumpulkan meliputi: identitas responden, potensi ekonomi rumahtangga, pendapatan dan konsumsi rumahtangga, dan jumlah pohon hidup, diameter serta tinggi pohon. Sedangkan data sekunder meliputi; letak dan luas, keadaan geografis, keadaan sosial ekonomi dan data lainnya yang didapat dari instansi-instansi terkait seperti desa, kecamatan, dinas pertanian dan instansi kehutanan.

Metode Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan yaitu:

1. Analisis persentase untuk mengetahui persentase pendapatan dari kegiatan tumpangsari Perhutanan sosial terhadap pendapatan total.
2. Analisis pendapatan kegiatan tumpangsari perhutanan sosial persatuan waktu yang diperoleh setiap peserta program (Rp/HOK).
3. Analisis beda rata-rata pendapatan total rumahtangga peserta dan bukan peserta.

4. Analisis persentase tumbuh, untuk mengetahui tingkat keberhasilan tanaman hutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lokasi program Perhutanan Sosial di petak 6 RPH Sukaraja, BKPH Singaparna, KPH Tasikmalaya, mulai dilaksanakan tahun 1987 dengan luas 19.5 hektar. Petak ini merupakan areal bekas tebang habis tanaman mahoni (*Swietenia* sp) tahun tanam 1957. Lokasi program perhutanan sosial tersebut mempunyai topografi bergelombang dengan jenis tanah laterit merah.

Apabila ditinjau dari konsep perhutanan sosial dimana lokasi program perhutanan sosial ditujukan pada hutan yang rawan, akibat tekanan sosial ekonomi penduduk, maka penetapan petak 6 di RPH Sukaraja sebagai lokasi perhutanan sosial kurang memenuhi. Luas kawasan hutan di daerah penelitian yang relatif kecil yaitu 40 ha tersebut serta interaksi penduduk terhadap hutan yang rendah menyebabkan kawasan hutannya relatif aman.

Jumlah anggota KTH di lokasi program perhutanan sosial RPH Sukaraja pada saat pembentukannya tercatat 112 orang, yang terbagi ke dalam 5 kelompok tani hutan yang masing-masing kelompok dipimpin oleh ketua kelompok. Anggota ini berasal dari 5 desa yaitu Desa Setiawargi, Desa Setiamulya, Desa Tamanjaya, Desa Urug dan Desa Gunung Tanala.

Anggota KTH tergabung dalam KTH Giri Mukti untuk mengelola kegiatan tumpang sari program perhutanan sosial seluas 19.3 Ha dengan rata-rata setiap anggota mendapatkan andil garapan 0.17 Ha. Sebagian besar anggota KTH mempunyai tingkat pendidikan yang rendah serta bermatapencaharian selain sebagai petani, juga berusaha sebagai buruh.

Dari segi pelaksanaan pembentukan keanggotaan KTH ini terlihat beberapa kelemahan yang terjadi. Penduduk yang menjadi anggota hanya didasarkan pada yang mau dan mampu bekerja, belum dilaksanakan penyeleksian terhadap calon anggota. Sebagian anggota KTH tidak memenuhi syarat-syarat keanggotaan seperti petani yang berlahan sempit dan tidak berlahan atau petani termiskin.

Sebaiknya pada saat ini dilaksanakan pengorganisasian kembali dari segi jumlah dan persyaratan keanggotaan KTH Giri Mukti. Anggota yang berjumlah lebih dari 100 orang dan berasal dari 5 desa mengakibatkan pelaksanaan pembinaan kurang efektif, motivasi anggota tidak dapat dikontrol serta KTH tidak dapat mewadahi partisipasi anggotanya. Meskipun program perhutanan sosial di RPH Sukaraja setelah berjalan selama 2 tahun, tetapi tampaknya perkembangan KTH Giri Mukti ini belum menunjukkan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan seperti; (a) keanggotaan masih belum stabil, (b) pengurus yang dibentuk tidak berfungsi, (c) rapat rutin anggota tidak berjalan,

(d) belum ada pembinaan dan penyuluhan secara rutin serta (e) belum ada sistem kerja secara ko-operati.

Keadaan tersebut berhubungan dengan peran PLPS dalam membina KTH masih kurang. Hal ini disebabkan jabatan PLPS selama ini masih dirangkap oleh KRPH Sukaraja sehingga porsi waktu untuk memberikan pembinaan dan penyuluhan terhadap KTH sangat kurang. Disamping itu, jumlah anggota KTH yang lebih dari 100 orang, yang berasal dari 5 desa, menjadi salah satu kendala agar KTH ini dapat berkembang secara baik.

Sumbangan program perhutanan sosial terhadap pendapatan rumahtangga peserta adalah sebagai berikut : Untuk startum I, sebesar Rp 40 922,- per tahun (5.20 %); Untuk stratum II sebesar Rp 31 655,- per tahun (4.35 %); stratum III Rp 26 500.- per tahun (6.05 %); untk stratum IV sebsar Rp 27 250,- per tahun (6.63 %). Masih kecilnya sumbangan dari kegiatan tumpangsari program perhutanan sosial ini disebabkan karena terjadi kegagalan panen tanaman palawija berupa padi, kacang tanah dan kacang kedelai akibat serangan hama. Serangan hama ini adalah untuk kedua kalinya sejak kegiatan tumpangsari dilakukan. Bila hasil yang diperoleh setiap peserta program dari kegiatan tumpangsari per satuan waktu dianggap sebagai imbalan kerja, maka besarnya imbalan kerja tersebut masih berada di bawah tingkat upah rata-rata buruh harian lepas, yang besarnya di desa penelitian Rp 1 500 per HOK. Besarnya imbalan kerja yang diperoleh dari hasil tumpangsari yaitu: stratum I sebesar Rp 1 019,- per HOK; stratum II, sebsar Rp 815,- per HOK ; stratum III sebesar Rp 839,- per HOK ; stratum IV sebesar Rp 866,- per HOK; secara keseluruhan, sebesar Rp 896,- per HOK.

Rata-rata pengeluaran per kapita rumahtangga peserta program sebesar Rp 121 886,- terdiri dari pengeluaran untuk pangan sebesar Rp 99 669,- (81.77 %) dan bukan pangan sebesar Rp 22 217 (18.23 %). Tingkat kemiskinan berdasarkan patokan Sajogyo (1977), nilai pengeluaran per kapita rumahtangga peserta program tersebut termasuk klasifikasi miskin.

Hasil uji beda rata-rata terhadap rumahtangga peserta dan bukan-peserta menunjukkan pada saat ini belum terdapat perbedaan besarnya rata-rata pendapatan total kedua golongan rumahtangga tersebut.

Dari pendugaan/penaksiran jumlah pohon hidup hasil sampling dapat diketahui tingkat persentase tumbuh tanaman pokok jati (*Tectona grandis*) mencapai 85.16 - 86.44 %. Keberhasilan tanaman hutan sesuai dengan tingkat persentase tumbuh tersebut termasuk dalam kategori baik. Namun di beberapa bagian terdapat tanaman jati yang pertumbuhan tingginya terlambat, terutama pada andil yang terletak di bagian atas (cembung) dari areal program perhutanan sosial. Hal ini kemungkinan telah terjadi erosi pada daerah tersebut.

Dengan kondisi topografi bergelombang di lokasi perhutanan sosial memungkinkan untuk terjadinya erosi, jika tidak disertai

usaha pengawetan tanah dan air pada lahan ditumpangсарikan itu. Usaha untuk mencegah terjadinya erosi di lapangan hanya dilaksanakan pada sebagian kecil dari daerah tersebut yaitu dengan pembuatan guludan dan teras. Kalaupun ada tanaman sela dalam hal ini nanas, untuk mencegah agar tidak terjadi erosi, pola tanamnya tidak benar. Tanaman nanas ini ditanam mengikuti kontur di antara larikan pokok, tetapi tidak rapat satu sama lain. Dengan pola tanam yang tidak rapat ini masih memungkinkan terangkutnya lapisan atas (top soil) yang subur melalui celah-celah antara tanaman sela yang satu dengan yang lainnya. Seharusnya tanaman sela nanas ini ditanam beberapa baris secara selang-seling ("huntu kala") sehingga kejadian erosi ini dapat ditekan sekecil mungkin.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pelaksanaan program Perhutanan Sosial di RPH Sukaraja pada tingkat Kelompok Tani Hutan belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
2. Sumbangan program Perhutanan Sosial terhadap pendapatan peserta program masih relatif kecil dan belum memadai.
3. Keberhasilan tanaman jati di lokasi program Perhutanan Sosial telah menunjukkan hasil yang cukup baik.

Saran

1. Diperlukan Petugas Lapangan Perhutanan Sosial (PLPS) yang khusus, tidak merangkap jabatan lain, agar dapat memberikan pembinaan, penyuluhan dan monitoring yang lebih intensif terhadap KTH.
2. Usaha kerja sama antara pihak Perum Perhutani dengan dinas pertanian atau instansi yang terkait lainnya perlu ditingkatkan, karena selama ini dirasakan masih kurang.
3. Pada pelaksanaan tumpangсari selanjutnya, perlu dipikirkan jenis tanaman yang tahan naungan untuk menggantikan tanaman pertanian yang tidak bisa lagi ditanam.
4. Mengingat kondisi topografi di lokasi Perhutanan Sosial bergelombang, diperlukan usaha dalam rangka pengawetan tanah dan air, untuk mencegah agar erosi tidak terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Kartasubrata. J. 1988. Program-program Perhutanan Sosial di Indonesia. ~~Rimba~~ Indonesia Vol XXII No 1 - 2, Departemen Kehutanan, Jakarta.

- King, K.F.S. and M.T. Chandler. 1978. The Wasted Lands. The Programme of Work of The International Council for Research in Agroforestry (ICRAF). ICRAF, Nairobi.
- Perum Perhutani. 1989. Pedoman Umum Perencanaan Perhutanan Sosial. Direksi Perusahaan Umum Kehutanan. Jakarta.
- Sajogyo. 1977. Garis Kemiskinan dan Kebutuhan Minimum Pangan. Lembaga Penelitian Sosiologi Pedesaan IPB. Bogor.
- Wiersum, K.F. 1984. Developing Strategies for Social Forestry: A Conceptual Approach. Working Paper. EPI East-West Center. Honolulu.